CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KERJA

Ahmad Jajuli
Universitas Bandar Lampung
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email : ahmadjaijuli2017@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in the work environment is influenced by individual, organizational, and societal factors. At the individual level, low morality, economic needs, consumptive lifestyles, and pressure from superiors can increase the risk of corruption. In terms of organization, a culture that supports corrupt practices, a weak supervision system, abuse of authority, and limited human resources contribute to the occurrence of corruption. Society also plays an important role through social norms, economic conditions, and political influences that consider corruption as a natural thing.Corruption prevention policies and procedures in Indonesia show positive aspects, such as the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK), increased transparency, anti-corruption education, and protection for whistleblowers. However, challenges such as systemic corruption, resistance to the KPK, and legal gaps still exist.Organizational culture plays a crucial role in preventing corruption by creating an ethical work environment, supporting employee behavior, and encouraging leadership with integrity. Work ethics education and training are also important to increase ethical awareness, integrate anti-corruption content, and develop character and leadership with integrity. Overall, a strong commitment from all parties is needed to create a clean work environment and reduce the negative impact of corruption on national development.

Keywords: *Corruption Prevention, Anti-Corruption Education, Job Environment.*

ABSTRAK

Korupsi di lingkungan pekerjaan dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, dan masyarakat. Di tingkat individu, rendahnya moralitas, kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan tekanan dari atasan dapat meningkatkan risiko korupsi. Dari sisi organisasi, budaya yang mendukung praktik korupsi, sistem pengawasan yang lemah, penyalahgunaan wewenang, serta keterbatasan sumber daya manusia berkontribusi pada terjadinya korupsi. Masyarakat

Article History
Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

juga memainkan peran penting melalui norma sosial, kondisi ekonomi, dan pengaruh politik yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar.Kebijakan dan prosedur pencegahan korupsi di Indonesia menunjukkan aspek positif, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peningkatan transparansi, pendidikan anti-korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower. Namun, tantangan seperti korupsi sistemik, perlawanan terhadap KPK, dan kesenjangan hukum masih ada.Budaya organisasi berperan krusial dalam mencegah korupsi dengan membentuk lingkungan kerja yang etis, mendukung perilaku karyawan, serta mendorong kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan dan pelatihan etika kerja juga penting untuk meningkatkan kesadaran etis, mengintegrasikan konten anti-korupsi, serta mengembangkan karakter dan kepemimpinan yang berintegritas. Keseluruhan, komitmen yang kuat dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan mengurangi dampak negatif korupsi terhadap pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Lingkungan Pekerjaan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Arti Harfiah: Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" dan "corruptus," yang berarti "rusak," "busuk," atau "tidak jujur" yang berkaitan dengan keuangan.Pengertian Korupsi: Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.[1]Korupsi dalam Konteks Pelayanan Publik: Dalam konteks pelayanan publik, korupsi sering kali diartikan sebagai perbuatan "korupsi administrasi" dengan fokus pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, pembuat kebijakan, atau pegawai birokrasi pemerintah atas berbagai kegiatan atau keputusan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Menurut Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

[1] Hartono, B., & Hasan, Z. (2021*). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk)*. *IBLAM Law Review*, *1*(3), 1-21.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.[2]

Korupsi memiliki dampak yang signifikan dalam lingkungan kerja, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Berikut adalah beberapa dampak korupsi dalam lingkungan kerja: Lebih Besar Biaya Operasional: Korupsi meningkatkan biaya operasional karena kerugian dari pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Kurangnya Kualitas Pelayanan: Korupsi dapat mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas barang dan jasa bagi public. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi: Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) dapat terganggu karena korupsi, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas dan meningkatnya angka pengangguran.[3] Pencegahan korupsi di lingkungan kerja dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil: Pendidikan dan Kesadaran,Keterbukaan dan Transparansi,Sistem Pelaporan Kecurangan,Penegakan Sanksi yang Tegas,Penerapan Nilai-Nilai Antikorupsi,Perbaikan Sistem Birokrasi, Budaya Kerja yang Positif.[4]

Jurnal ini juga ingin menyoroti tentang faktor-faktor terjadinya korupsi dilingkungan pekerjaan, menyoroti tentang efektivitas kebijakan dan prosedur yang ada dalam mencegah korupsi di lingkungan pekerjaan, dan pendidikan dan pelatihan mengenai etika kerja dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi. Dengan adanya sinergi yang baik antara ketiga pihak tersebut, korupsi dilingkungan pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Lingkungan pekerjaan dan Budaya pekerjaan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi dengan memberikan pengawasan dan masukan, sementara Pendidikan anti korupsi berperan sebagai pelaksana utama dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada para pekerja. Dengan demikian, penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pekerja dan staf karyawan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pekerjaan. Diharapkan, melalui jurnal ini, para pekerja, pengambil kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait dapat lebih memahami pentingnya pendidikan antikorupsi dan bagaimana menerapkannya secara efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

II. RUMUSAN MASALAH

- Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di lingkungan pekerjaan dan bagaimana strategi pencegahannya dapat diimplementasikan secara efektif ?

---

[2] Masfi Sya'fiatul Ummah, "*Brahmapur Bribery Index, 2009 Urban Corruption Survey In Brahmapur, Orisa,"Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14, Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.

[3] Susi Amalia, "*Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," Epistemik: Indonesian Journal Of Social And Political Science* 3, No. 1 (2022): 54–76, Https://Doi.Org/10.57266/Epistemik.V3i1.77.

[4] Zainudin Hasan Et Al., "*Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*," *Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology* 1, No. 2 (2024): 308–15, Https://Doi.Org/10.57235/Jalakotek.V1i2.2368.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang "Pencegahan Koruspsi di Lingkungan Pekerjaan" dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko sepatu (Bintang Ebertha Favian), dengan mencantumkan beberapa pertanyaan terkait pencegahan korupsi di lingkungan pekerjaan, sebagai berikut :

1. Apa pentingnya pencegahan korupsi?
2. Apa pentingnya pelatihan anti korupsi?
3. Apa peran penting kesadaran anti korupsi?

Dengan beberapa pertanyaan tersebut, narusumber menjalaskan bahwa pentingnya pelatihan rutin untuk karyawan. Ini berarti mengadakan sesi pelatihan secara berkala, di mana karyawan diajarkan tentang berbagai risiko yang bisa terjadi terkait korupsi. Selain pelatihan, pemilik toko juga menyebutkan pentingnya sistem pengawasan yang berkala. Ini berarti melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang terjadi. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, toko dapat mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih besar. Ini membantu mencegah kerugian yang lebih besar akibat tindakan korupsi. Mengetahui bahwa ada pengawasan membuat karyawan lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka tahu bahwa ada risiko untuk ketahuan jika melakukan hal-hal yang tidak benar. Dengan demikian hasil wawancara saya dari pemilik toko sepatu adalah pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang resiko korupsi dan pentingnya sistem pengawasan yang bersifat berkala untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.

IV. PEMBAHASAN

PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEKERJAAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di lingkungan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, termasuk faktor individu, organisasi, dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing faktor tersebut:

- **Faktor Internal Individu**
    1. Rendahnya Moralitas: Individu dengan moralitas yang rendah cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Ketidakmauan untuk menegakkan etika dan integritas dalam pekerjaan dapat menyebabkan perilaku koruptif.
    2. Kebutuhan Ekonomi: Penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa mendorong individu untuk mencari jalan pintas melalui korupsi1
    3. Gaya Hidup Konsumtif: Kecenderungan untuk hidup mewah dan konsumtif tanpa dukungan finansial yang memadai dapat memicu tindakan korupsi sebagai cara untuk mendapatkan uang tambahan.
    4. Tekanan dari Atasan: Dilema etika yang muncul akibat tekanan dari atasan atau rekan kerja juga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam praktik korupsi.

- **Faktor Aspek Organisasi**
    1. Budaya Organisasi: Budaya yang mendukung atau mentolerir praktik korupsi dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan tersebut dianggap biasa dan diterima.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Sistem Pengawasan yang Lemah: Kurangnya sistem kontrol dan pengawasan yang efektif memungkinkan individu melakukan tindakan korupsi tanpa takut akan konsekuensi.
3. Penyalahgunaan Wewenang: Jabatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, yang berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Terbatasnya SDM yang berkualitas dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan akuntabilitas di dalam organisasi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya korupsi.

- **Faktor Aspek Masyarakat**
  1. Norma Sosial: Nilai-nilai sosial yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar atau bahkan menguntungkan dapat memperkuat perilaku koruptif di kalangan individu dalam organisasi.
  2. Kondisi Ekonomi Masyarakat: Ketidakstabilan ekonomi di masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka korupsi, karena individu merasa tertekan untuk mencari cara-cara ilegal demi kelangsungan hidup.
  3. Pengaruh Politik: Intervensi atau pengaruh dari partai politik dan kepentingan lainnya sering kali menciptakan situasi di mana praktik korupsi dianggap sebagai bagian dari proses bisnis yang normal dalam lingkungan pekerjaan.

Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi dan pemerintah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di tempat kerja.[5]

Efektivitas kebijakan dan prosedur dalam mencegah korupsi di lingkungan pekerjaan di Indonesia memiliki beberapa aspek positif dan tantangan. Berikut adalah ringkasan dari hasil penelitian dan artikel yang relevan:

- **Aspek Positif**
  1. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):**
     Pembentukan KPK pada tahun 2002 merupakan langkah signifikan dalam penanggulangan korupsi. KPK memiliki wewenang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi, sehingga telah berhasil menangani banyak kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara.
  2. **Transparansi dan Akuntabilitas:**
     Pemerintah Indonesia telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan implementasi sistem *e-government* dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), yang memungkinkan akses publik terhadap informasi dan layanan pemerintah secara online. Ini membantu mengurangi peluang korupsi dengan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
  3. **Pendidikan dan Penyuluhan Anti-Korupsi:**
     Program-program pendidikan anti-korupsi telah dipromosikan di berbagai tingkat pendidikan dan masyarakat. Tujuan program ini adalah membangun budaya antikorupsi

[5] Zainudin Hasan, *"Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum," Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 03 (2023): 828–31, Https://Doi.Org/10.59141/Comserva.V3i03.833.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sejak dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran. Upaya ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi di kalangan generasi muda dan mengurangi toleransi terhadap korupsi di masa depan.

4. **Melindungi Whistleblowers:**
   Perlindungan whistleblower adalah penting agar masyarakat merasa aman melaporkan kasus korupsi tanpa takut akan pembalasan. Undang-undang perlindungan pelapor (*whistleblower*) harus diterapkan dan dijaga dengan baik untuk memfasilitasi laporan korupsi.

- **Tantangan**
  1. **Korupsi Sistemik:**
     Korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan birokrasi membuat penanggulangan menjadi sangat sulit. Beberapa pejabat masih memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi, sehingga mempersulit upaya pemberantasan korupsi.
  2. **Perlawanan Terhadap KPK:**
     KPK sering menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi. Ini termasuk upaya melemahkan KPK melalui revisi undang-undang dan tekanan politik.
  3. **Kesenjangan Hukum:**
     Masih ada kesenjangan dalam penerapan hukum di mana beberapa kasus korupsi besar belum ditangani dengan tuntas atau pelakunya belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini memperlambat proses pemberantasan korupsi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur anti-korupsi, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan kerjasama dan dedikasi yang intensif, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, serta mengurangi dampak negatif korupsi terhadap pembangunan nasional. [6] Budaya organisasi memainkan peran krusial dalam mencegah atau memfasilitasi terjadinya korupsi di tempat kerja. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku korupsi:

Peran Budaya Organisasi dalam Mencegah Korupsi

1. **Pengaruh Terhadap Perilaku Karyawan:**
   Budaya organisasi yang kuat dan positif dapat menurunkan kecenderungan perilaku korupsi di kalangan karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai budaya organisasi, semakin rendah kecenderungan perilaku korupsi. Hal ini karena budaya yang baik mendorong karyawan untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab.
2. **Penciptaan Lingkungan Kerja yang Etis:**
   Budaya organisasi yang mengedepankan integritas, kepercayaan, dan profesionalisme dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku etis. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan tindakan karyawan untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.

[6] Laras Celviana Lakmidaca et al., "Efektivitas Penanganan Korupsi di Indonesia," no. October (2023): 1–16.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. **Sistem Pengawasan dan Aturan:**
   Budaya organisasi juga berkaitan erat dengan sistem pengawasan dan aturan yang diterapkan di tempat kerja. Organisasi dengan budaya yang baik biasanya memiliki sistem pengawasan yang efektif dan aturan yang jelas tentang sanksi bagi pelanggaran, sehingga memperkecil peluang terjadinya korupsi.
4. **Faktor Kepemimpinan:**
   Kepemimpinan yang baik sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya organisasi. Pemimpin yang menegakkan nilai-nilai etis dan memberikan contoh perilaku yang baik akan mendorong karyawan untuk mengikuti jejak tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.
5. **Kesadaran Individu:**
   Kesadaran dan komitmen individu terhadap nilai-nilai positif dalam budaya organisasi juga sangat penting. Ketika setiap anggota organisasi memiliki niat yang kuat untuk berperilaku baik, hal ini dapat menciptakan energi positif yang mendukung pencegahan **korupsi.**[7]
6. **Faktor Penghambat:**
   Meskipun budaya organisasi dapat menjadi pencegah korupsi, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:
7. **Kepemimpinan yang Lemah:**
   Jika kepemimpinan tidak tegas atau tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai etis, maka budaya organisasi tidak akan efektif dalam mencegah korupsi.
8. **Kurangnya Sistem Pengawasan:**
   Lemahnya sistem pengawasan internal dapat membuka peluang bagi praktik korupsi untuk berkembang, meskipun budaya organisasi sudah baik.
9. **Tekanan Eksternal:**
   Tekanan dari luar, seperti tuntutan untuk mencapai target tertentu dengan cara-cara tidak etis, dapat mengganggu budaya positif dan mendorong perilaku korupsi.

Secara keseluruhan, budaya organisasi memiliki potensi besar untuk mencegah korupsi di tempat kerja melalui pembentukan lingkungan kerja yang etis, dukungan dari kepemimpinan, serta penerapan sistem pengawasan yang efektif. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten.[8]

Pendidikan dan pelatihan mengenai etika kerja memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencegahan korupsi di tempat kerja. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pendidikan dan pelatihan ini dapat berperan:

1. **Peningkatan Kesadaran Etis**
   Pendidikan etika memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan pentingnya integritas dalam lingkungan kerja. Dengan memahami konsekuensi dari tindakan korupsi, individu lebih cenderung untuk menghindari perilaku yang tidak etis.

---

[7] Supriatmo Supriatmo, *"Budaya Organisas Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan," Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2019): 91, https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.178.
[8] Satyo Hernawan Ramdhan, Rahmi Fauzia, and Rendy Achmad, *"Peranan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Perilaku Korupsi Pada Pegawai Instansi Pemerintahan Kota Banjarbaru," Jurnal Kognisia* 2, no. 1 (2019).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. **Integrasi Konten Anti-Korupsi dalam Kurikulum**
   Memasukkan materi tentang pencegahan korupsi ke dalam kurikulum pendidikan formal dapat membantu membentuk karakter dan sikap antikorupsi sejak dini. Hal ini mencakup pengajaran tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas.
3. **Pelatihan Keterampilan Komunikasi**
   Pelatihan yang fokus pada keterampilan komunikasi efektif memungkinkan individu untuk berani melaporkan tindakan korupsi dan berbicara tentang isu-isu etika di tempat kerja. Ini juga menciptakan lingkungan di mana diskusi mengenai integritas menjadi hal yang biasa dan didorong.[9]
4. **Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan**
   Program pendidikan yang menekankan pengembangan karakter dan kepemimpinan yang berintegritas dapat menciptakan pemimpin masa depan yang tidak hanya memahami pentingnya etika tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Pemimpin yang baik dapat menjadi teladan bagi karyawan lainnya, sehingga membangun budaya organisasi yang anti-korupsi.
5. **Metode Pembelajaran Partisipatif**
   Menggunakan metode pembelajaran interaktif, seperti diskusi kelompok atau studi kasus, dapat mendorong siswa atau karyawan untuk berpikir kritis mengenai situasi etis yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja. Ini membantu mereka memahami bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam konteks nyata.
6. **Membangun Budaya Integritas**
   Pelatihan yang konsisten mengenai etika kerja membantu membangun budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran. Ketika nilai-nilai ini menjadi bagian dari budaya perusahaan, karyawan merasa lebih terikat untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut.
7. **Penerapan Kebijakan Disiplin**
   Pendidikan juga harus mencakup penjelasan tentang kebijakan disiplin terkait pelanggaran etika dan korupsi. Dengan mengetahui bahwa ada konsekuensi nyata untuk tindakan korupsi, individu akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis.[10]

IV. KESIMPULAN

Pencegahan korupsi di tempat kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan etis. Pemilik toko menekankan bahwa pelatihan rutin bagi karyawan adalah langkah kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko korupsi. Melalui pelatihan ini, karyawan diberi pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghindari tindakan koruptif. Selain itu, pentingnya sistem pengawasan yang berkala juga diungkapkan. Dengan melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara teratur, toko dapat mendeteksi potensi masalah sebelum berkembang menjadi lebih besar, sehingga mencegah kerugian yang lebih

[9] M Yusuf, A Sahrin, and H Yusuf, *"Analisis Peran Pendidikan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Program dan Alternatif Strategi.," Triwikrama: Jurnal Ilmu …* 01, no. 11 (2023).
[10] GotoKorupsi cermin etika sikap dan mental individu Kusanto and Widyaiswara Utama,*"Korupsi Cermin Etika Sikap dan Mental Individu,"* Behavioral and Ethics 1, no. 1 (2016): 1–15.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

signifikan. Pengawasan ini juga berfungsi sebagai pendorong bagi karyawan untuk berperilaku lebih hati-hati dan etis, karena mereka sadar akan adanya risiko untuk terdeteksi jika melakukan pelanggaran. Secara keseluruhan, kombinasi pelatihan rutin dan sistem pengawasan yang efektif adalah strategi yang krusial dalam mencegah korupsi, serta membangun budaya kerja yang berintegritas. Keberhasilan pencegahan korupsi bergantung pada komitmen bersama untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

V. SARAN

Pelatihan dan Edukasi: Adakan pelatihan rutin tentang etika kerja dan pencegahan korupsi untuk seluruh karyawan. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integritas. Kebijakan yang Jelas: Buat dan sosialisasikan kebijakan anti-korupsi yang jelas dan komprehensif. Semua karyawan harus memahami aturan dan konsekuensi dari pelanggaran. Sistem Pelaporan yang Aman: Sediakan saluran pelaporan yang aman dan anonim untuk karyawan yang ingin melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan pembalasan. Pengawasan dan Audit: Lakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Pengawasan yang ketat dapat mencegah tindakan korupsi. Kepemimpinan yang Teladan: Pemimpin harus menjadi contoh dalam hal integritas dan transparansi. Kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi karyawan untuk bertindak dengan cara yang sama. Reward dan Penghargaan: Berikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi dalam mencegah korupsi. Ini dapat memotivasi lainnya untuk berbuat serupa. Penilaian Risiko: Lakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap korupsi dan ambil tindakan pencegahan yang sesuai. Komunikasi Terbuka: Dorong budaya komunikasi terbuka di mana karyawan merasa nyaman untuk mendiskusikan masalah etika atau kekhawatiran tanpa rasa takut. Keterlibatan Stakeholder: Libatkan semua pemangku kepentingan, termasuk vendor dan mitra bisnis, dalam program pencegahan korupsi untuk memastikan transparansi di seluruh rantai pasokan. Tindak Lanjut: Pastikan ada tindak lanjut yang jelas terhadap laporan dugaan korupsi. Tindakan cepat dan tegas dapat memperkuat pesan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi**.**

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 12 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Susi. *Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). Epistemik: Indonesian Journal of Social And Political Science*.

Hasan, Zainudin. *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

Hasan, Zainudin, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, and Salsabila Mindari. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*.

Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (Apbk) yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*.

Kusanto, Gotokorupsi Cermin Etika Sikap dan Mental Individu, and Widyaiswara Utama. *Korupsi Cermin Etika Sikap dan Mental Individu. Behavioral and Ethics*.

Lakmidaca, Laras Celviana, Aqiilah Raeghinaa Azahra, Kania Septiani, and Arrum Cahyaningrum. *Efektivitas Penanganan Korupsi di Indonesia*.

Ramdhan, Satyo Hernawan, Rahmi Fauzia, and Rendy Achmad. *Peranan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Perilaku Korupsi Pada Pegawai Instansi Pemerintahan Kota Banjarbaru*. *Jurnal Kognisia*.

Supriatmo, Supriatmo. *Budaya Organisas dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Brahmapur Bribery Index, 2009 Urban Corruption Survey In Brahmapur, Orisa*. *Sustainability (Switzerland)*.

Yusuf, M, A Sahrin, And H Yusuf. *Analisis Peran Pendidikan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Program Dan Alternatif Strategi.*